

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, proses pembangunan sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan degradasi lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan perlu memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun mendatang. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dengan tujuan menghapus kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Bagi Indonesia, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan ini diharapkan mampu mendorong negara menjadi lebih maju, berkembang di berbagai sektor, serta mengimplementasikan konsep ekoomi berkelanjutan secara optimal dan komprehensif, sehingga Indonesia dapat mencapai status sebagai negara maju sepenuhnya (Pangestu et al., 2021)

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan nasional yang mengatur pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu landasan hukum utama adalah Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun (2022) tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pencapaian SDGs. Melalui peraturan tersebut, pencapaian SDGs diarahkan untuk dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan karena berada paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab menerjemahkan arah dan target SDGs ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang tidak hanya efisien dan transparan tetapi juga responsif terhadap kebutuhan individual dan kolektif (Hakeu & Alim, 2024). Dengan demikian, keberhasilan pencapaian SDGs di tingkat nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun memiliki peran strategis, pemerintah daerah dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, kapasitas aparatur, maupun koordinasi lintas sektor, sering kali menjadi hambatan dalam mencapai target SDGs secara optimal. Selain itu, kompleksitas permasalahan sosial dan ekonomi di tingkat lokal menuntut adanya pendekatan pembangunan yang lebih adaptif dan kontekstual. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga berpengaruh terhadap efektivitas program pembangunan berkelanjutan yang dijalankan di daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara mandiri. Permasalahan pembangunan menuntut adanya keterlibatan berbagai aktor di luar pemerintah yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi di tingkat lokal. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan aktor non-pemerintah, seperti komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi, menjadi penting untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang lebih partisipatif, efektif, dan berkelanjutan.

Salah satu contoh komunitas lokal yang berperan aktif dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat daerah adalah komunitas

yang bernama Tanoker yang berkedudukan di kecamatan Ledokombo. Kabupaten Jember. Tanoker berasal dari bahasa Madura Pendalungan yang berarti kepompong, yang mencerminkan filosofi sebagai ruang untuk bertumbuh, bertransformasi, dan memberdayakan individu, khususnya anak-anak. Tanoker didirikan sebagai respon terhadap permasalahan sosial di wilayah Ledokombo, Kabupaten Jember, yang dikenal sebagai kampung buruh migran, di mana banyak anak mengalami permasalahan pengasuhan akibat orang tua bekerja sebagai TKW/TKI di luar negeri. Dalam menjalankan kegiatannya, Tanoker menggunakan pendekatan budaya dan permainan tradisional, terutama egrang, sebagai media pembelajaran, ekspresi, dan pemberdayaan, sehingga anak-anak dapat bermain, bergembira, serta mengembangkan potensi diri secara positif.

Seiring dengan perkembangannya, Tanoker Ledokombo tidak hanya berfokus pada isu pengasuhan anak, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, kegiatan Tanoker Ledokombo difokuskan pada kontribusinya terhadap SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), melalui penguatan ekonomi kreatif masyarakat, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif komunitas lokal memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian SDGs di tingkat daerah.

Dalam implementasinya, Tanoker Ledokombo yang berada di Kecamatan Ledokombo menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Desa Sumber Lesung yang juga berada di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dalam mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bentuk kerja sama yang dilakukan meliputi penguatan ekonomi kreatif berbasis komunitas, pelatihan keterampilan masyarakat, serta pengembangan potensi lokal yang bertujuan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat desa. Kolaborasi ini secara langsung mendukung pencapaian SDGs 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi di tingkat desa.

Kelebihan Tanoker Ledokombo sebagai studi kasus dalam penelitian ini terletak pada perannya sebagai komunitas lokal yang mampu bekerja sama secara

berkelanjutan dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal. Tanoker tidak hanya menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri, tetapi juga terlibat dalam program pembangunan Desa Sumber Lesung melalui kemitraan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan usaha berbasis komunitas. Pola kerja sama ini menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas lokal dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian berjudul “Kolaborasi Pemerintah dan Komunitas Lokal (Tanoker Ledokombo) dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini secara khusus berfokus pada pencapaian SDG 8 melalui kolaborasi antara Tanoker Ledokombo dan Pemerintah Desa Sumber Lesung dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menciptakan peluang kerja di tingkat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Komunitas Tanoker Ledokombo dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Komunitas Tanoker Ledokombo dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kabupaten Jember.

2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal dalam implementasi program SDGs di Tanoker Ledokombo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai praktik kolaborasi pemerintahan di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi kolaboratif yang lebih efektif dengan komunitas lokal guna mempercepat pencapaian SDGs.

b. Bagi Komunitas Tanoker Ledokombo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman mengenai pentingnya sinergi dengan pemerintah untuk memperkuat peran komunitas dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pelestarian budaya lokal.